

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang mengalami krisis, baik dalam stabilitas ekonomi, sosial, politik, maupun mental. Pada saat ini, pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan diberbagai bidang agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata baik material maupun spiritual sesuai dengan yang tertuang dalam Garis–Garis Besar Haluan Negara.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut pemerintah memerlukan dana yang amat besar. Dana tersebut diperoleh dengan cara memanfaatkan sumber-sumber penerimaan. Dua sumber penerimaan negara, yaitu sumber dana dalam negeri dan luar negeri. Sumber dalam negeri berasal dari sektor migas dan non migas. Sedangkan sumber dana luar negeri diperoleh dari bantuan dan pinjaman luar negeri. Indonesia pada jaman orde baru hanya mengandalkan penerimaan negara dari sektor migas. Pendapatan ini diperoleh dengan mengekspor migas keluar negeri. Tetapi pada saat ini sektor migas tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan nasional yang sedang berlangsung karena sifat sumber daya migas yang tidak dapat diperbaharui dan semakin berkurangnya persediaan migas di Indonesia. Dengan menurunnya pendapatan

dari sektor migas, pemerintah berusaha mencari sumber pendapatan lainnya dari sektor non migas yaitu berupa pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang ideal, karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Oleh sebab itu pemerintah berusaha untuk menggali potensi dari penerimaan pajak. Meningkatnya kontribusi penerimaan pajak di Indonesia mulai terlihat dari tahun 1980 sampai dengan saat ini. Peningkatan ini disebabkan banyak faktor antara lain adanya berbagai pembaharuan di bidang perpajakan, baik sistem perpajakan maupun undang–undang perpajakannya yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan negara, serta menurunnya peranan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam dan terjadinya krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 yang berdampak besar kepada peranan penerimaan pajak dalam APBN. Dengan meningkatnya kontribusi penerimaan pajak diharapkan dapat memberikan pengaruh. Pengaruh tersebut antara lain dapat menggeser peranan penerimaan bukan pajak yaitu: minyak dan gas alam, juga mengganti peranan pinjaman luar negeri yang selama ini ternyata menjadi sumber utama dari pembiayaan pembangunan. serta adanya perubahan paradigma dalam menetapkan anggaran APBN dari anggaran defisit menuju anggaran berimbang yang juga menuntut meningkatnya kontribusi penerimaan dari sektor pajak.

Sehingga dengan banyaknya harapan dan tuntutan terhadap penerimaan sektor pajak, menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis. Berikut ini kita dapat melihat realisasi dari penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak dari 2003-2005 (Dalam Triliun)

	2003	2004	2005
Realisasi Penerimaan pajak	242	279,2	322,6

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2005.

Dalam rangka merealisasikan rencana atau target penerimaan tersebut pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, secara terus menerus dan berkesinambungan melaksanakan upaya konkret dengan berpegang pada prinsip keadilan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa. “Segala pajak untuk keperluan negara harus di atur dengan Undang–Undang“. Karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara dalam menyukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran serta masyarakat perlu terus ditingkatkan dalam mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah salah satu sumber utama penghasilan negara. Agar penerimaan pemerintah dari sektor pajak bertambah, maka prosedur pemungutan pajak perlu disederhanakan, tarif pajak harus fleksibel sesuai dengan keadaan. Jika masyarakat mengerti tentang fungsi dan manfaat pajak maka masyarakat menjadi sadar untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga dengan sendirinya timbul disiplin pajak (*tax Discipline*), dimana Wajib Pajak selalu memenuhi kewajiban–kewajiban mereka tepat pada waktunya. Penerapan pajak yang baik serta pengawasan yang efektif akan memudahkan perusahaan atau Wajib Pajak dalam menyesuaikan diri apabila terjadi perubahan–perubahan. Tetapi pada umumnya, walaupun sudah mengerti fungsi dan manfaat pajak, masyarakat cenderung menghindar untuk membayar pajak.

Hal ini dikarenakan Wajib Pajak tidak menerima secara langsung imbalan dan manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Karena itu, Wajib Pajak sering merencanakan data mereka saat membayar pajak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menetapkan sistem pajak, dimana Wajib Pajak diberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sehingga akan memacu keaktifan dan kejujuran Wajib Pajak. Cara ini disebut *system self assessment*, sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami masyarakat. Penerimaan pemerintah dari dalam negeri telah menunjukkan peningkatan yang cukup terutama penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*Value added*) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak apakah pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama. Pajak ini merupakan pajak tidak langsung dimana beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak didalam negeri (di dalam daerah pabean). Oleh karena itu, atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang memberikan pemasukan yang cukup besar bagi negara, karena setiap masyarakat yang melakukan pembelian dan penyerahan barang atau jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengenaan dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai akan berdampak dan akan berpengaruh pada laba perusahaan. Berdasarkan pola pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah bagaimana hubungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap laba perusahaan yang diperoleh CV. Bintang Mas. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“HUBUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP LABA PERUSAHAAN”

1.2 Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Bintang Mas
2. Bagaimana hubungan antara Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Perusahaan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Bintang Mas
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laba Perusahaan.

1. 4 Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian, diharapkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

1. Sebagai persyaratan dalam menempuh ujian sidang sarjana lengkap strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
2. Untuk menambah wawasan penulis untuk menganalisa, mengkaji, dan mengevaluasi tentang masalah perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai, cara perhitungannya, pemungutannya, dan cara pelaporannya.
3. Untuk memperoleh gambaran secara langsung sejauh mana teori–teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dapat mendukung keadaan sebenarnya dalam praktek.

2. Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha.

Proposal penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan membantu sebagai evaluasi dalam tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Peningkatan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan keberhasilan suatu negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan harus didukung oleh dana yang mencukupi. Sumber dana yang diperoleh pemerintah dari dalam negeri salah satunya adalah melalui pajak. Pajak pada dasarnya merupakan iuran rakyat kepada kas negara dari berbagai sektor, yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan telah mengalami penyempurnaan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak dalam menghindari kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan agar Wajib Pajak lebih bertanggung jawab didalam melaksanakan kewajibannya. Pajak berfungsi sebagai alat atau sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian (fungsi *regulered*), dimana pemerintah menjalankan fungsi untuk mengumpulkan dana dengan memasukkan uang yang berasal dari pajak ke kas negara sebanyak-banyaknya dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH dalam buku Perpajakan, (2002: 1).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tarif perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, pasal 7 dan pasal 8. Pajak Pertambahan Nilai timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan. dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan kepada pihak konsumen.

Jadi menurut Undang–Undang Pajak Pertambahan Nilai jika pembeli membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak maka pihak penjual akan memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan tersebut, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut saat penjualan barang dagangan merupakan pajak keluaran bagi penjual tersebut, sedangkan sewaktu membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak maka pihak penjual akan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak masukan bagi pembeli. Dengan demikian nampaknya Pajak Pertambahan Nilai dikenakan beberapa kali pada setiap terjadi penjualan dan efek pajak bergandanya dapat dieliminasi dengan adanya sistem pengkreditan pajak (pajak keluaran dikurangi pajak masukan) hasilnya dapat berupa lebih bayar atau kurang bayar yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN formulir 1195) PPN tersebut akan diperhitungkan, disetorkan, dan dilaporkan dengan menggunakan *System Self Assesment*

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dapat diperoleh dari transaksi-transaksi penjualan dan pembelian yang tercatat dalam Laporan Laba Rugi. Karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu komponen pengurangan dalam Laporan Laba Rugi. Pajak Pertambahan Nilai dapat mengurangi pendapatan tetapi bukan sebagai biaya. Sehingga Pajak Pertambahan Nilai akan mempengaruhi besar dan kecilnya laba yang akan diterima oleh perusahaan. Jika Pajak Pertambahan Nilai besar maka laba perusahaan akan menjadi kecil. Begitu pula sebaliknya, jika Pajak Pertambahan Nilai perusahaan kecil maka laba yang akan diterima oleh perusahaan akan menjadi besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: **“Terdapat hubungan yang signifikan antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Laba Perusahaan”**.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan proposal penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat di gambarkan dengan jelas mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang nyata dan tampak pada situasi yang diselidiki, dimana data disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk maksud memperoleh data langsung dari perusahaan yang bersangkutan. Yaitu dengan cara :

♣ **Wawancara**

Adalah proses untuk memperoleh keterangan melalui suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan suatu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung.

♣ **Observasi**

Adalah proses untuk memperoleh keterangan melalui pengamatan langsung terhadap data yang telah dikumpulkan

♣ **Dokumentasi**

Adalah mengumpulkan dan meneliti data dan catatan-catatan dan dokumen perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan diperoleh dengan berpedoman pada literature-literature, buku-buku referensi dan catatan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan masalah yang dikemukakan diatas. Dari penelitian tersebut penulis mencoba untuk melakukan analisa yang kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan dan analisa-analisa.

3. Metode Analisis Hipotesis.

A. Penetapan Hipotesis

Pengujian hipotesis dari hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_1).

Perumusan penelitian ini adalah :

1. H_0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Laba Perusahaan.
2. H_1 ; Terdapat hubungan yang signifikan antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Laba Perusahaan.

B. Perhitungan tes statistik

Salah satu yang digunakan untuk menguji hipotesis dasar yang bersifat sementara dari hasil analisa statistik sehingga dapat ditarik kesimpulannya yaitu pengujian hipotesis dasar. Jenis statistik yang digunakan adalah statistik mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. Metode statistik yang digunakan menganalisis data atau fakta adalah dengan menggunakan metode korelasi *rank spearman*. Analisis ini dipergunakan untuk menganalisis kuatnya hubungan antara dua variabel.

Rumus Korelasi *Rank Spearman*.

$$r = 1 - \left\{ \frac{6 \cdot \sum d^2}{n(n^2 - 1)} \right\}$$

Keterangan.

r = Korelasi *Spearman*.

6 = Sampel Kecil.

d = Selisih range x dan range y .

n = Jumlah data berpasangan.

Tingkat signifikan yang dipakai adalah 0,05 untuk menunjukkan korelasi anantara kedua variabel yang cukup nyata dan umum digunakan, serta merupakan tingkat signifikan umum yang digunakan untuk penelitian ilmu sosial. Kriteria yang dipakai untuk penerimaan atau penolakan H_0 adalah :

H_0 diterima jika : $\text{sig (2-tailed) } > \text{tingkat signifikan.}$

H_0 ditolak jika : $\text{sig (2-tailed) } < \text{tingkat signifikan.}$

Setelah mengetahui besarnya koefisien korelasi., kita dapat mengetahui hubungan antara kedua variabel yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Laporan Keuangan Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila (-) berarti terdapat pengaruh yang negative.

Apabila (+) berarti terdapat pengaruh yang positif

1. 7 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penulis melakukan penelitian di CV. Bintang Mas yang bergerak di bidang jasa Tour & Traveling, yang berlokasi di Jalan Mayor Salim Batubara No 54. Bandar Lampung–Teluk Betung, Kupang Teba. Penelitian dilakukan mulai bulan September 2006 sampai selesai.